

EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KAMPUNG CANGGOANG KELURAHAN JUHUT KECAMATAN KARANG TANJUNG KABUPATEN PANDEGLANG

Zulfa Fazira Az-Zahra^{1(a)}, Riny Handayani^{2(b)}, Tiwi Rizkiyani^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{a)}6661200114@untirta.ac.id, ^{b)}gmriny@yahoo.co.id, ^{c)}tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

13-10-2024

Diterbitkan Online:

16-12-2024

Kata Kunci:

Evaluasi, Program, Kampung Keluarga Berencana

Keywords:

Evaluation, Program, Family Planning Village

Corresponding Author:

6661200114@untirta.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kampung Cangoang Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan yaitu teori William N Dunn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Cangoang, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa program ini secara umum belum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena ketidakmerataan pelatihan bagi pengurus kampung KB, kurangnya tenaga kerja, anggaran yang tidak memadai, pembaruan data di Sekretariat Rumah Data belum dilakukan secara rutin, laporan dari setiap kelompok kegiatan tidak tersedia, dan rendahnya penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, petugas kampung KB, dan masyarakat. Kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program agar dapat berjalan dengan baik.

ABSTRACT

The Indonesian government has launched the Family Planning Program (KB) as a strategic step to address various population-related challenges. This study aims to evaluate the Kampung Keluarga Berkualitas (Quality Family Village) Program in Kampung Cangoang, Juhut Village, Karang Tanjung District, Pandeglang Regency. The theory used in this research is William N. Dunn's theory. This study employs a descriptive qualitative method. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is interactive data analysis from Miles and Huberman. The research findings indicate that the evaluation of the Kampung Keluarga Berkualitas Program in Kampung Cangoang, Juhut Village, Karang Tanjung District, Pandeglang Regency, suggests that the program has generally not succeeded in achieving its intended goals. This is due to the uneven training provided to KB village managers, a shortage of workforce, inadequate budget, the irregular updating of data at the Data House Secretariat, the unavailability of reports from each activity group, and low contraceptive use. Therefore, it requires good cooperation between the government, KB village officers, and the community. This cooperation is crucial to improve the program's effectiveness and ensure its proper implementation.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.230>

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Antara 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun, dari 72,81 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik., 2024).

Seiring dengan kemajuan zaman, penduduk di seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, termasuk di Indonesia. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 281.603,8 jiwa (Badan Pusat Statistik., 2024b). Hal ini terjadi peningkatan dari 278.696,2 jiwa pada tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 2.907,6 jiwa, yang mengindikasikan pertumbuhan populasi yang signifikan.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan kependudukan. Program ini dirancang dengan tujuan utama untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak. Selain itu, Program KB juga berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan holistik, program ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui integrasi berbagai sektor, Program KB diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, serta Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 tanggal 12 Januari 2016, Program Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi pedoman untuk pengembangan Kampung KB di seluruh Indonesia (Wita, 2019). Dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016, Kampung KB merupakan wilayah tingkat kelurahan yang mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan sistem kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 843.4/2879/SJ tanggal 15 April 2020, Program Kampung Keluarga Berencana berubah menjadi Keluarga Berkualitas karena penyelenggaraan Kampung KB belum maksimal (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional., 2023b). Inpres Nomor 3 Tahun 2022 diterbitkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Keluarga Berkualitas (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia., 2022).

Program Kampung KB di Kabupaten Pandeglang mencakup 35 kecamatan, termasuk Kecamatan Karang Tanjung. Di Kecamatan Karang Tanjung, telah dibentuk empat Kampung KB: Pagadungan, Kadumerak, Cigadung, dan Juhut. Berikut adalah perbandingan antara Kampung KB yang ada di Kecamatan Karang Tanjung.

Tabel 1. Jumlah Kampung KB Di Kecamatan Karang Tanjung

Kelurahan	Kampung	Tahun di Bentuk	Klasifikasi
Pagadungan	Pagadungan	14 Juni 2023	Dasar
Kadumerak	Kadumerak	21 Juni 2023	Dasar
Cigadung	Kadulolo	14 Maret 2017	Berkelanjutan
Juhut	Canggoang	22 Februari 2018	Berkembang

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023

Berdasarkan Tabel 1, sejak awal pembentukannya hampir enam tahun yang lalu, Kampung KB Canggoang di Kelurahan Juhut masih berstatus sebagai Kampung KB berkembang. Status ini menunjukkan bahwa meskipun program telah diimplementasikan, kontribusinya terhadap capaian program masih terbatas. Dengan kata lain, program ini belum secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau mewujudkan tujuan dari keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB di Kampung Canggoang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: SK.476/Kep.112-Huk/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang menetapkan lokasi Desa/Kelurahan sebagai binaan Kampung KB (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional., 2023). Selain itu, Surat Keputusan Kepala Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung Nomor: 35/Kep.-Kel.Juhut/2018 tanggal 12 Maret 2018 juga mengatur pembentukan Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB di Kelurahan Juhut. Keputusan-keputusan ini merupakan dasar untuk pelaksanaan dan

pengelolaan program Kampung KB di daerah tersebut.

Terdapat beberapa masalah terkait evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Cangoang, Kecamatan Juhut, Kabupaten Pandeglang, yang mengakibatkan capaian program belum optimal. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Cangoang, yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan program.

Kedua, terdapat kekurangan dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kampung Cangoang. Beberapa faktor yang mengakibatkan ketidakikutsertaan masyarakat dalam program KB meliputi: Pertama, faktor agama, di mana kekhawatiran bahwa KB mungkin bertentangan dengan ajaran agama dan dianggap dapat mencegah kehamilan; Kedua, efek samping, seperti ketidakstabilan hormon yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kesehatan; Ketiga, penolakan terhadap alat kontrasepsi, baik dari kelompok tertentu maupun individu. Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kampung KB, yang menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya berhasil menjangkau dan melibatkan seluruh anggota komunitas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Cangoang, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kampung Cangoang Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengamati dan mendalami objek secara mendetail. Metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami peristiwa atau fenomena secara menyeluruh, mencakup keseluruhan konteks dan aspek yang terlibat, bukan hanya bagian-bagian terpisah dari peristiwa tersebut. Teknik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan secara rinci situasi atau masalah yang terjadi pada saat ini atau yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini,

metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Cangoang Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang. Untuk menentukan informan, peneliti menerapkan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memenuhi kriteria khusus guna memastikan keabsahan dan validitas data yang diperoleh. Terdapat 20 informan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, berikut informan yang digunakan:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (orang)
1.	Ketua Kampung Keluarga Berkualitas Perwakilan BKKBN Provinsi Banten	1
2.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Pandeglang	1
3.	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Karang Tanjung	1
4.	Lurah Juhut	1
5.	Ketua RW di Kampung Cangoang	1
6.	Ketua RT di Kampung Cangoang	1
7.	Tokoh Masyarakat Kampung Cangoang	1
8.	Tokoh Agama Kampung Cangoang	1
9.	Ketua Kampung KB di Kampung Cangoang	1
10.	Ketua Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIKR, Rumah Dataku Kampung KB Cangoang	6
11.	Kader/Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, UPPKA	2
12.	Masyarakat Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, UPPKA, PIKR	3

Sumber: Peneliti, 2024

Teknik pengumpulan data yang diterapkan melibatkan triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan untuk menguji

konsistensi data dengan membandingkan hasil yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat dipercaya. Teknik analisa data yang digunakan dengan analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yaitu terdapat pengumpulan data (*Data Collection*), Kondensasi data (*Data Condensation*), Penyajian data (*Data Display*), Menarik kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verifying Conclusions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti secara sistematis menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang relevan, khususnya teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Teori ini mencakup enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 1999:429-438), yang masing-masing digunakan untuk menilai dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dan dampak kebijakan yang dianalisis. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan pembahasan yang telah diperoleh dengan cara yang menyeluruh dan terperinci, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Efektivitas

Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, efektivitas terkait dengan pencapaian dampak atau hasil yang telah ditetapkan sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Ada lima indikator utama untuk menilai efektivitas, yaitu kesesuaian sasaran, ketepatan waktu, kualitas program, pelaksanaan fungsi secara optimal, dan pencapaian tujuan.

a) Kesesuaian Sasaran

Kesesuaian sasaran merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan kesesuaian sasaran dalam program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Canggoang, dapat diidentifikasi bahwa penetapan sasaran program ini didasarkan pada beberapa kondisi penting. Program Kampung KB ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah seperti rendahnya tingkat penggunaan kontrasepsi, kondisi lingkungan yang kumuh, keterbelakangan

wilayah, dan kualitas hidup yang rendah. Pemerintah memilih Kampung Canggoang sebagai lokasi untuk program ini karena memenuhi kriteria tersebut, sehingga keputusan tersebut selaras dengan tujuan dan prinsip dasar pemilihan kampung KB yang telah ditetapkan. Kesesuaian sasaran kelompok kegiatan di Kampung Canggoang mencakup keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja, keluarga yang memiliki lansia, remaja itu sendiri dan keluarga pra sejahtera. Sejalan dengan tujuan Program Kampung KB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut.

b) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengacu pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan atau program dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa ketepatan waktu pada Program Kampung KB di Kampung Canggoang telah menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat kelemahan terkait tidak adanya jadwal tetap untuk pelaksanaan kegiatan. Jadwal kegiatan di Kampung Canggoang bervariasi setiap bulannya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi berbagai tuntutan. Meskipun demikian, terdapat kegiatan rutin yang dijalankan secara konsisten, seperti penyelenggaraan posyandu untuk bayi dan balita yang dilaksanakan setiap tanggal 12, menegaskan komitmen program terhadap ketepatan waktu dan perencanaan yang terstruktur.

c) Kualitas Program

Kualitas program merujuk pada sejauh mana program atau kebijakan dirancang dan dilaksanakan dengan baik, serta memenuhi standar yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa di Kampung Canggoang, program Kampung KB telah mengalami kemajuan signifikan, beralih dari kategori berkembang ke status berkelanjutan. Walaupun jarak dari kategori berkembang ke berkelanjutan selama enam tahun. Kemajuan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah strategis dan kerja sama lintas sektor yang telah memperbaiki kualitas program, mulai dari pelaksanaan hingga pelaporan, dan mendukung kemajuan keseluruhan program Kampung KB.

d) Pelaksanaan Fungsi Secara Optimal

Pelaksanaan fungsi secara optimal merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program dilaksanakan dengan cara yang paling efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait menegaskan bahwa pelaksanaan program Kampung KB tidak dapat dilakukan secara mandiri. Di Kampung Cangoang, program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Kerjasama ini memastikan bahwa setiap aspek program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat dikelola dengan baik, memfasilitasi integrasi yang harmonis, dan menghasilkan hasil yang optimal.

e) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pencapaian tujuan program Kampung KB di Kampung Cangoang menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan kemajuan nyata dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan ini berkat dukungan aktif masyarakat dan keterlibatan pengurus Kampung KB yang berkomitmen untuk memperbaiki dan memperluas program. Pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR), dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Namun, kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) menghadapi kendala terkait anggaran dan kurangnya kerja sama dengan lintas sektor. Kendala ini memerlukan perhatian serius dan upaya perbaikan agar BKL dapat beroperasi lebih efektif. Memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Efisiensi

Efisiensi dalam konteks ini mengukur sejauh mana kebijakan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya minimal. Ada enam indikator penilaian efisiensi: sumber daya

manusia, material, anggaran, metode, waktu, serta data dan informasi.

a) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi sumber daya manusia merujuk pada sejauh mana sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau program digunakan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan program Kampung KB di Kampung Cangoang Sumber daya manusia (SDM) di Kampung Cangoang belum mencapai tingkat optimal akibat ketidakmerataan pelaksanaan pelatihan di berbagai kegiatan. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas dan keterampilan para pengurus Kampung KB, serta berdampak pada pelaksanaan program secara keseluruhan. Banyak pengurus yang memegang beberapa peran sekaligus, sehingga beban tugas menjadi sangat berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengurus dan penambahan tenaga kerja agar program Kampung KB dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

b) Efisiensi Sumber Daya Material

Efisiensi sumber daya material" merujuk pada sejauh mana sumber daya fisik dan material yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau program dimanfaatkan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan program Kampung KB di Kampung Cangoang menunjukkan kemajuan signifikan dalam infrastruktur, dengan fasilitas seperti sekretariat rumah data, gapura, dan tugu Kampung KB. Sekretariat rumah data berfungsi sebagai pusat manajemen informasi, sementara gapura dan tugu memperkuat identitas program dan kebanggaan komunitas. Berikut terdapat gambar sekretariat rumah data di Kampung Cangoang.



Gambar 1. Sekertariat Rumah Data

Sumber: Peneliti, 2024

c) Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran merujuk pada sejauh mana alokasi dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan atau program dilakukan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan anggaran yang saat ini dialokasikan belum mencukupi kebutuhan berbagai kegiatan di Kampung Cangoang. Akibatnya, dampak pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi kurang maksimal, berpotensi menghambat perkembangan dan kemajuan komunitas. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian anggaran agar semua kegiatan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

d) Efisiensi Metode

Efisiensi metode merujuk pada sejauh mana metode atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau program dilakukan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengurus Kampung KB di Kampung Cangoang menggunakan pendekatan mendalam untuk mencapai tujuan, dimulai dengan analisis kebutuhan lapangan untuk memahami tantangan dan peluang. Mereka juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait dan melibatkan sosialisasi, diskusi, serta pendampingan langsung kepada masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif dan pemahaman program.

e) Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu merujuk pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan atau program dilakukan dalam waktu yang tepat dan seefisien mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menilai efisiensi waktu pelaksanaan di Kampung Cangoang, diterapkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang mendetailkan jadwal dan target kegiatan tahunan atau enam bulanan, dengan melakukan kegiatan minimal satu kali sebulan. Semua aktivitas dilaporkan rutin melalui website Kampung KB untuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, informasi RKM di website masih merujuk pada dokumen tahun 2023, menunjukkan perlunya pembaruan agar data di website selalu relevan dan sesuai dengan tahun berjalan.

f) Data Dan Informasi

Data dan informasi merujuk pada sejauh mana data dan informasi yang relevan

digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan secara efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan data kampung KB di Kampung Cangoang dapat diakses melalui website Kampung KB serta sekretariat Rumah DataKu untuk pemantauan dan pengambilan keputusan. Berikut terdapat publikasi data di rumah data:



Gambar 2. Publikasi Data Di Sekretariat Rumah Dataku

Sumber: Peneliti, 2024

Jika dilihat pada Gambar 2. data di Sekretariat Rumah DataKu masih menggunakan tahun 2022-2023 dan belum diperbarui, Keterlambatan pembaruan ini menghambat akurasi dan relevansi data, serta dapat mempengaruhi efektivitas analisis dan pengambilan keputusan.

Kecukupan

Kecukupan mengukur sejauh mana sebuah kebijakan atau program memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan, serta apakah kebijakan tersebut memadai dalam mencapai hasil yang diinginkan atau mengatasi masalah. Indikator penilaian kecukupan meliputi pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, kesesuaian prosedur, dan pengawasan program.

a) Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan dalam dimensi kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau kelompok sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan program Kampung KB di Kampung Cangoang berhasil memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Di bidang kesehatan, posyandu mengelola kegiatan penting seperti pemberian vitamin dan nutrisi untuk anak-anak dan ibu

hamil. Di sektor pendidikan, kesadaran akan pentingnya pendidikan meningkat, ditunjukkan oleh partisipasi aktif dalam program pendidikan dan upaya meningkatkan akses serta kualitas pendidikan. Dukungan pemerintah juga signifikan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan rumah bedah, yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta memperbaiki kondisi tempat tinggal. Jika dilihat dari kelompok kegiatan yang ada di Kampung Cangoang telah berjalan dengan baik. Namun, dua kegiatan masih menghadapi tantangan, yaitu Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Keduanya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

b) Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam dimensi kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah yang menjadi alasan dibentuknya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah, penyelenggara Kampung KB di Kampung Cangoang menggunakan musyawarah dengan lurah, RT, RW, dan kader setempat untuk mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Jika diperlukan kolaborasi lintas sektor, mereka menjalin kerjasama dengan pihak terkait, melakukan pendampingan intensif, dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai masalah yang ada. Namun, kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) belum berhasil mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan anggaran yang tidak mencukupi. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menghambat efektivitas program, sehingga diperlukan upaya lebih untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antar sektor.

c) Kesesuaian Prosedur

Kesesuaian prosedur dalam dimensi kecukupan merujuk pada sejauh mana prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan atau program sesuai dengan standar, norma, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan panduan pelaksanaan Program Kampung KB di Kampung Cangoang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi, termasuk Instruksi Presiden, surat dari Kemendagri, Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023, dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor SK.476/Kep.112-Huk/2018 dan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Juhut Nomor: 35/Kep.-Kel.Juhut/2018. Koordinasi dilakukan melalui kelompok kerja (pokja) desa untuk memastikan prosedur diikuti dengan benar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis prosedur dilakukan dalam pertemuan pokja di tingkat kabupaten, mencakup pengumpulan data, penilaian respons masyarakat, dan evaluasi efektivitas.

d) Pengawasan Program

Pengawasan program dalam dimensi kecukupan merujuk pada sejauh mana mekanisme pengawasan dan kontrol diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan atau program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengawasan pelaksanaan Program Kampung KB di Kampung Cangoang dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah, serta diskusi intensif dengan kelompok kerja (pokja) untuk mencari solusi dan meningkatkan efektivitas. Pemerintah juga memantau aktivitas secara terstruktur melalui website Kampung KB dan mengadakan evaluasi berkala dengan pengurus untuk menilai kemajuan, efektivitas, dan area perbaikan.

Perataan

Kriteria perataan mengukur sejauh mana hasil kebijakan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat, tanpa menimbulkan ketimpangan antar kelompok. Terdapat tiga indikator penilaian perataan: keadilan kelompok sasaran, pemerataan distribusi program, dan manfaat yang diterima.

a) Keadilan Kelompok Sasaran

Keadilan kelompok sasaran dalam dimensi perataan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program memperhatikan dan menjamin distribusi manfaat yang adil di antara kelompok sasaran yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengurus Kampung KB di Kampung

Canggoang memastikan pemerataan dengan melaksanakan pembinaan menyeluruh, termasuk pelatihan dan pendampingan, serta sosialisasi intensif melalui berbagai metode komunikasi. Pelayanan dilakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dengan memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama ke fasilitas dan bantuan. Pengurus juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dipertimbangkan.

b) Pemerataan Distribusi Program

Pemerataan distribusi program dalam dimensi pemerataan merujuk pada sejauh mana program atau kebijakan didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap manfaat dan layanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa distribusi program dilaksanakan dengan menetapkan penanggung jawab di setiap desa untuk memastikan pelaksanaan Program Kampung KB secara merata. Evaluasi rutin dilakukan di Balai KB dengan membahas laporan dari setiap kelurahan di Kecamatan Karang Tanjung, yang memungkinkan identifikasi isu dan pencapaian. Laporan kegiatan dipublikasikan melalui website Kampung KB untuk memastikan transparansi dan memudahkan pemantauan perkembangan program oleh pemerintah dan pihak terkait.

c) Manfaat Yang Diterima

Manfaat yang diterima dalam dimensi pemerataan merujuk pada sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan atau program dirasakan dan diterima oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan manfaat Program Kampung KB di Kampung Canggoang jika dilihat pada Kelompok kegiatan (poktan) di Kampung Canggoang telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif. Misalnya, dalam Bina Keluarga Balita (BKB), program posyandu, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan Pemberian Makan Tambahan (PMT) berkontribusi pada kesehatan anak. Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) melakukan sosialisasi yang memperkuat pengetahuan remaja, sedangkan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) memberikan pelatihan UMKM yang

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) belum berjalan optimal karena kebutuhan dana, sehingga saat ini hanya pengajian yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Responsivitas

Kriteria responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan atau program merespons kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran. Indikator penilaiannya meliputi responsivitas positif (dukungan), responsivitas negatif (penolakan), kemampuan merespons umpan balik, dan kemampuan menanggapi keluhan.

a) Responsivitas Positif

Responsivitas positif dalam dimensi responsivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program secara proaktif memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan tanggapan yang positif terhadap umpan balik yang diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dukungan terhadap berbagai kegiatan di Kampung Canggoang sudah mencapai tingkat optimal. Namun, beberapa program, seperti Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), masih memerlukan tambahan dukungan anggaran. Hal ini penting agar pelaksanaan dan pencapaian kegiatan tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, jika ada laporan dari masyarakat mengenai program Kampung KB di Kampung Canggoang, pengurus akan mengevaluasi dan mencari solusi. Pelaporan masalah tidak mengikuti mekanisme formal dan tidak ada kotak saran. Sebagai gantinya, umpan balik dikumpulkan secara langsung melalui komunikasi lisan dengan kader, RT, atau pihak terkait.

b) Responsivitas Negatif

Responsivitas negatif dalam dimensi responsivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program tidak memenuhi kebutuhan, harapan, atau masukan dari masyarakat, serta bagaimana tanggapan terhadap masalah atau isu yang muncul bersifat tidak memadai atau bahkan merugikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa meskipun program Kampung KB di Kampung Canggoang diterima dengan baik, terdapat penolakan terhadap penggunaan kontrasepsi. Ini menunjukkan perlunya

pendekatan sosialisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada pendidikan dan informasi yang jelas. Pengurus perlu aktif meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai metode komunikasi, diskusi, dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan program.

c) Kemampuan Merespon Umpan Balik

Kemampuan merespon umpan balik dalam dimensi responsivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat menerima, menganalisis, dan mengimplementasikan masukan atau umpan balik dari masyarakat atau pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa umpan balik masyarakat Kampung Cangoang menjadi pertimbangan utama untuk memperbaiki program. Respon pemerintah sangat penting untuk evaluasi dan peningkatan program, melalui pengumpulan, analisis masukan, dan rapat koordinasi untuk merumuskan solusi. Proses ini memastikan masukan diproses dengan cermat agar masyarakat merasa dihargai dan program lebih efektif. Masyarakat menilai respon pengurus sangat positif dalam hal menangani keluhan dan masukan yang diterima.

d) Kemampuan Menanggapi Keluhan

Kemampuan menanggapi keluhan dalam dimensi responsivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat mendengarkan, merespons, dan menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam mengelola dan menanggapi keluhan masyarakat mengenai Program Kampung KB di Kampung Cangoang dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menangani permasalahan. Keluhan mendesak biasanya ditangani segera, sementara masalah kompleks memerlukan waktu lebih lama dan koordinasi intensif. Menurut masyarakat di Kampung Cangoang, pengurus Kampung KB rutin merespons dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat dengan penuh perhatian.

Ketepatan

Kriteria ketepatan menilai sejauh mana kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kriteria ini memiliki tiga indikator yaitu kesesuaian tujuan dengan hasil, manfaat program, dan perubahan yang dicapai.

a) Kesesuaian Tujuan Dengan Hasil

Kesesuaian tujuan dengan hasil dalam dimensi ketepatan merujuk pada sejauh mana hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan atau program sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kesesuaian tujuan dengan hasil dalam Program Kampung KB di Kampung Cangoang terlihat dari dampak positif pada kualitas masyarakat dan sumber daya manusia. Meskipun tidak semua tujuan tercapai sepenuhnya, ada kemajuan signifikan dalam kesejahteraan, kondisi ekonomi, kesehatan, meningkatnya penggunaan MKJP, pendidikan dan lingkungan.

b) Manfaat Program

Manfaat program dalam dimensi ketepatan merujuk pada sejauh mana program atau kebijakan memberikan manfaat yang diharapkan kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa program Kampung KB di Kampung Cangoang membawa banyak perubahan positif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan kemajuan dalam pengetahuan serta sikap terhadap program keluarga berencana. Sosialisasi dan penyuluhan intensif membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan program kampung KB. Selain itu, program ini menawarkan pelatihan kewirausahaan yang mendorong kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun bantuan untuk usaha kecil, sembako, uang tunai, dan fasilitas seperti sekertariat rumah data. Dengan adanya kampung KB ini di kampung cangoang juga sering melakukan Gotong royong dan musyawarah, berkat dukungan pemerintah dan manfaat nyata dari program ini.

c) Perubahan yang Dicapai

Perubahan yang dicapai dalam dimensi ketepatan merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil menciptakan perubahan yang diinginkan dalam kondisi atau situasi masyarakat yang menjadi sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perubahan yang dicapai melalui kegiatan di Kampung Cangoang telah menunjukkan hasil positif dan memuaskan. Dalam Bina Keluarga Balita (BKB), terdapat peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian MPASI yang bergizi untuk mencegah stunting.

Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) berhasil meningkatkan pemahaman tentang cara menghindari pergaulan bebas. Selain itu, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) juga menunjukkan peningkatan pengetahuan dalam membuat makanan seperti rangginang. Namun, kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) belum mencapai tingkat optimal akibat kurangnya anggaran dan sumber daya manusia. Ini menunjukkan adanya peluang signifikan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan upaya yang tepat, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

PENUTUP

Kendala yang dihadapi oleh program kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kampung Cangoang Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung yaitu rendahnya efisiensi sumber daya manusia, dan anggaran saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) perlu diperbarui untuk menyusun jadwal kegiatan yang lebih efektif, serta pembaruan data di Sekretariat Rumah Data belum dilakukan. Selain itu, tidak adanya laporan dari kelompok kegiatan (poktan) sehingga menyulitkan proses evaluasi. Pengurus kampung KB juga harus meningkatkan sosialisasi mengenai Program KB dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) agar masyarakat lebih memahami manfaatnya. Dengan demikian, pelaksanaan Program Kampung KB di Kampung Cangoang belum optimal, oleh karena itu, pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kampung Cangoang memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, petugas kampung KB, dan masyarakat. Kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023a). *Gambaran Umum Kampung Cangoang*. BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023b). *Sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)*. BKKBN.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14646/intervensi/565228/sosialisasi-kampung-keluarga-berkualitas-kampung-kb>

- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Gadjah Mada University Press.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Inilah Inpres 3/2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/inilah-inpres-3-2022-tentang-optimalisasi-penyelenggaraan-kampung-keluarga-berkualitas/>
- Wita, I. M. (2019). *Implementation of Kampung KB in increasing community self-help at Kampung KB*. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2), 163–168. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.10323>